



ISLAM AND HUMANITIES

(Islam and Malay Local Wisdom)

Prosiding

PROSIDING

ISLAM AND HUMANITIES

(Islam and Malay Local Wisdom)

Ballroom Grand Hotel Swarna Dwipa Palembang

08-11 September 2017



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v

Sub Tema 1 : Pemakalah Utama

1. Khoshoishu al-Lughoh al-'Arobiyah : Dirosah fi al-Mazaya wa al-Simaat ; <i>Hasan bin Abdullah bin Muhammad Ghonayman</i>	3- 38
2. 'Inayah al-Nabi Sholallah 'Alaihi Wasalam bi al-Tarikh : <i>Abdul Aziz bin Sulaiman al-Muqbil</i>	39-123
3. Dauru al-Syi'ri wa al-Syu'aro' fi Tahqiqi al-Fi'il al-Hadhoriy : <i>Ridwan Jamal al-Athras</i>	124-141
4. Peranan dan Sumbangan Abdul Somad Al-Falimbani dalam Wacana Keilmuan Islam di Alam Melayu ; <i>Mohammed Hussain Ahmad</i>	142-153
5. Bahasa Jawi dan Peranannya dalam Pembentukan Peradaban Malayonesia; <i>Noriah Mohamed</i>	154-175
6. Bahasa dan Politik : Analisis Makna Konotatif dalam Ciri-Ciri Pemimpin dan Kepemimpinan Muda Omar Ali Saifuddien : <i>Dyg Fatimah Hj Awang Chuchu</i>	176-192
7. The Political Ethnicity of Dutch Colonialism Against Islamic Sultanates in Archipelago; <i>Abdullah Idi</i>	193- 214

Sub Tema 2 : Study Melayu

1. Peranan Bahasa Arab Terhadap Perkembangan Kebudayaan Islam Melayu di Nusantara (Tinjauan Sejarah) ; <i>Arki Auliahadi</i>	217-229
2. History of Islamic Da'wah on Malay Langkat Community, Nort Sumatra, Indonesia ; <i>Azhar dan Suryo Adi Sahutra</i>	230-241
3. Dunia Melayu dalam Sejarah : Kajian Terhadap Identitas Melayu ; <i>Lukmanul Hakim</i>	242-254
4. Wasiat dalam Sejarah Melayu sebagai Nilai Kearifan Lokal Islam Melayu ; <i>Masyhur</i>	255-262
5. Kebudayaan Melayu dalam Membentuk Karakter yang Mulia ; <i>Susy Deliani, Sri Sulistyawati, Rosmawati Harahap</i>	263-276
6. H. Darwis Zakaria Menebar Kearifan Lokal Melayu di Tanah Bugis ; <i>Nasruddin</i>	277-286
7. Perdagangan dan Koversi Agama di Dunia Melayu : Studi Terhadap Islamisasi di Kerajaan Inderapura Abad 17-18 M ; <i>Sudarman</i>	287-297
8. Menjajaki Sumbangan Palembang dalam Peradaban Islam Melayu Abad Ke-18 ; <i>Mal'An Abdullah</i>	298-314

Sub Tema 3: Sejarah Kebudayaan Islam

1. Dinamika Kebudayaan Suku Dayak Bakumpai di Kalimantan Tengah (Studi tentang Akulturasi Budaya Lokal dan Agama Islam) ; <i>H. Abu Bakar H.M dan Iqbal</i>	314-329
---	---------

2. Bentuk-bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Bengkulu ; *Maryam dan Ahmad Abas Musofa*..... 330-344
3. Nilai-nilai Islam dalam Budaya Kearifan Lokal (Konteks Budaya Minangkabau) ; *Kori Lilie Muslim*..... 345-353
4. Negosiasi Tradisi dan Agama dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara ; *Asliah Zainal, Sudarmi Suud dan Muhammad Asrianto Zainal* 354-368
5. Tradisi Ziarah Kubur pada Makam Keramat/ Kuno Jakarta : Pendekatan Sejarah ; *Parlindungan Siregar* 369-387
6. Pelestarian Budaya Lokal di Sulawesi dengan Tafsir Bahasa Bugis (Telaah Fungsional dan Metodologi Tafsir al-Munir dan Tafsir Akorang Mabbasa Ugi) ; *Andi Miswar* 388-397
7. Perjuangan KH. Muhammad Daut Arif di Kuala Tungkal dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949 ; *Siti Syuhada dan Siti Ramayani*..... 398-408
8. Peranan Organisasi PITI dalam Mempercepat Pembauran Etnis Tionghoa Muslim di Kota Padang ; *Doni Nofra* 409-420
9. Profil Wanita Minangkabau : Analisis Sosial Filosofi Terhadap KABA sebagai Warisan Budaya ; *H. Taufiqurrahman dan Yulfira Riza* 421-438
10. Revolusi Mental di Minangkabau Abad XX : Kajian atas Naskah Khutbah Syaikh Abdul Hamid Hakim ; *Sofyan Hadi* 439-448

Sub Tema 4 : Bahasa dan Sastra Arab

1. Al-Shurah al-Tashbihyah fi al-Ahadits al-Nabawiyah al-Waridah fi al-Kitab al-'Arba'in al-Nabawiyah ; *Haniah* 451-463
2. Pesan Moral dalam Naskah Tazkirah al-Thulab ; *Nuchalis Sofia*..... 464-472
3. Naskah Tazkir al-Ghabi : Dimensi Lokal dan Intelektual ; *Erman dan Ahmad Taufik Hidayat*..... 473-485
4. Discovering Scientific Genealogy of Syekh Burhan al-Din Ulakan Through Tahqiq Manuscripts ; *Firdaus* 486-494
5. Perspektif Islam Melayu : Kajian Sastra Ulama Minang Kabau ; *Yulizal Yunus* 495-515
6. Perilaku Sintaksis Adjung Bahasa Arab ; *Faqihul Anam* 516-525
7. Kolofon Bertoponim Semarang dalam Manuskrip Sabil al-Muhtadin Karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari ; *Masyhudi Kurdi* 526-535
8. Dinamika Kebudayaan Islam dalam Teks Syair Perang Palembang ; *Raden Muhammad Ali Masri*..... 536-548

Sub Tema 5 : Politik Islam dan Ilmu Perpustakaan

1. Representasi Peran Politik Bundo Kanduang pada Sistem Pemerintahan Nagari dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat ; *Amaliatulwalidain*..... 551-565
2. Dinamika Berjilbab Melalui Penerapan Peraturan Daerah (Perda) di Sumatera Barat ; *Arjoni*..... 566-579

3. Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Nan Sapilin : Mewujudkan Kepemimpinan *Good Governance* di Minangkabau Berlandaskan *Adat Basandi Syarak – Syarak Bersandi Kitabullah* ; Gusnar Zein dan Dian Hasfera580-597
4. Rasa Cinta Tanah Air Eksil Politik Indonesia dalam Novel “Pulang” Karya Leila S. Chudor ; *Shinta Fitria Utami*.....598-602
5. Islam dan Kearifan Lokal Melayu dalam Bidang Politik ; Tradisi Politik Melayu Islam di Persimpangan Jalan ; *J. Suyuthi Pulungan*.....603-615
6. Tracing the Concept of Political Leadership of Islam Nusantara ; *Idrus Alkaff dan Zaki Faddad Syarif Zain*.....616-627
7. Kemas Ulang Informasi dalam Melestarikan Pengetahuan Tradisional *Baralek Khatam Al Quran* di Nagari Kamang Hilia Kec. Kamang Magek Kab. Agam Prov. Sumatera Barat ; *Resty Jayanti Fakhlina dan Fauzi*.....628-639
8. Eksplorasi Proses Pencarian Ilmu Ulama Palembang pada Naskah al-Jawi al-Palembani Abad ke-18 M ; *Herlina*.....640-650
9. Representation of Indonesian Progressive Islam in the Cyberspace : An Analysis of “*www.islambergerak.com*” as an Alternative Public Sphere for Marginalized Muslim Group ; *Subekti W. Priyadharma dan Eni Maryani*651-665
10. Studi Eksplorasi Peran Perpustakaan sebagai Pusat Deposit dalam Pengembangan Islam dan Kearifan Lokal Melayu dalam Naskah Nusantara ; *Hj. Sri Rohyanti Zulaikha*666-677
11. Hoax dari Segi Norma dan Kearifan Lokal di Aceh ; *Saifuddin A. Rasyid*678-688

ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL MELAYU DALAM BIDANG POLITIK ; TRADISI POLITIK MELAYU ISLAM DI PERSIMPANGAN JALAN

J. Suyuthi Pulungan

Guru Besar Sejarah Peradaban Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
(Email ; jsuyuthipulungan_uin@radenfatah.ac.id)

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk menggali kearifan lokal mengenai gagasan politik Islam Melayu yang diharapkan memberikan kontribusi dalam perpolitikan Indonesia saat ini, khususnya berkaitan dengan upaya membangun *good governance* di tanah air saat ini yang masih carut marut. Secara historis, sumbangan terbesar Melayu Islam adalah turut andil membentuk jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Ajaran Islam telah mengakar dalam masyarakat Melayu, sehingga melandasi nilai-nilai kehidupan masyarakat Melayu, termasuk di ranah politik. Ironisnya, kini orientasi politik masyarakat Melayu Indonesia berada di persimpangan jalan sebab nilai-nilai Islam sudah tergerus oleh “dagelan” politik yang dipentaskan oleh para politisi dan pejabat negara yang korup. Dalam hal inilah perlu menggali kembali pemikiran cendekiawan Melayu abad ke-19 M, yakni; Raja Ali Haji (1809-1870) yang menggagas bentuk pemerintahan ‘teo-monarki’ dan Abdullah Munsyi (1787-1854) dengan gagasan paham kebangsaan Melayu. Meski pemikiran Raja Ali Haji dan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi berbeda. Tetapi, secara substansif sama, yakni berupaya merubah *mindset* adat istiadat dunia Melayu utamanya perilaku para raja yang tidak sesuai dengan Islam dan merugikan rakyat yang dipimpinnnya. Titik temu pemikiran politik Melayu Raja Ali Haji dan Abdullah Munsyi relevansi dengan realitas politik Melayu Islam Indonesia saat ini perlu adanya *good governance* (pemerintahan yang baik). *Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, *civil society*, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak. Karena dilandasi ajaran agama (Islam), akan terwujud spirit *good governance* di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : *Islam, Kearifan Lokal, dan Tradisi Politik Melayu*

A. Pendahuluan

Salah seorang sejarawan dan budayawan Melayu, Tuanku Luckman Sinar Basyarsyah¹ pernah mengatakan orang Melayu mengaku identitas kepribadian yang utama adalah apabila telah memenuhi syarat sebagai orang Islam, berbahasa Melayu, mempergunakan adat istiadat Melayu, dan menetap di kawasan Melayu. Agama Islam yang menjadi dasar (fondasi) pokok agama inilah menjadi sumber adat istiadat Melayu. Oleh sebab itu, adat istiadat Melayu bersendikan syariah dan kitabullah. Di sini, Tuanku Luckman Sinar Basyarsyah hendak menegaskan bahwa ajaran Islam telah mengakar di masyarakat Melayu, sehingga

¹Lihat Tuanku Luckman Sinar Basyarsyah, “Jati Diri”, dalam Tuanku Luckman Sinar Basyarsyah dan Wan Syaifuddin (ed), *Kebudayaan Melayu Sumatera Timur*, (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1987). Dalam konteks inilah, seperti dikatakan Oman Fathurahman, terminologi “Islam” dan “Melayu” telah menjadi semacam kata kunci. Pada dasarnya, kata “Islam” dan “Melayu” merupakan dua entitas yang merujuk pada dua makna yang berbeda. *Yang pertama*, merujuk pada sebuah tatanan dengan sekumpulan nilai yang diyakini oleh pemeluknya sebagai *way of life*. Dan *yang kedua*, merujuk pada sebuah komunitas di wilayah tertentu, di mana Indonesia berada di dalamnya. Karenanya, yang disebut sebagai masyarakat Melayu adalah mereka yang menjadi bagian dari komunitas di wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, Islam dan Melayu menjadi dua kata yang sering harus berjalan beriringan. Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu, dan sebaliknya masyarakat Melayu juga menjadi sangat identik dengan Islam. Bagi komunitas Melayu, hal ini terefleksikan dalam satu slogan: “masuk Islam berarti menjadi Melayu”, atau dengan ungkapan lain; “menjadi Melayu berarti menjadi Muslim”. Lihat Oman Fathurahman, “Demokrasi dalam Tradisi Politik Islam Melayu”, dalam <http://islamlib.com/politik/demokrasi/demokrasi-dalam-tradisi-politik-islam-melayu/>. Diakses 1 Juli 2017, pukul 19.00 WIB. Lihat juga Adian Husaini, “Liberalisasi Islam Tantangan bagi Peradaban Melayu”, dalam Hamid Fahmy Zarkasyi dkk, *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 55. Lihat juga ulasan, Abdul Hadi, “Islam di Nusantara dan Transformasi Kebudayaan Melayu”, dalam <https://ahmadsamantho.wordpress.com/2008/04/10/islam-di-nusantara-dan-transformasi-kebudayaan-melayu/>. Diakses 2 Juli 2017, pukul. 19.00 WIB.

nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam niscaya melandasi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu, tak terkecuali dalam mengekspresikan gagasan-gagasan tentang politik, seperti konsep kekuasaan, penguasa atau raja, hubungan penguasa dengan rakyat, serta hal-hal lain yang berada dalam ranah politik. Hal ini tampak dalam pembahasan teks-teks Melayu klasik, semisal Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai--dua teks yang masing-masing berbicara tentang kerajaan Samudra Pasai dan Malaka abad 14 dan 15--di mana perumusan Islam sebagai basis etika politik terlihat dengan jelas pada isu-isu pokok politik yang mengemuka dalam keseluruhan isi pembahasan. Merah Silu, salah seorang raja Pasai, misalnya, digambarkan bahwa sesaat setelah beralih ke agama Islam segera memakai gelar Arab, Sultan, dan, dalam suatu sidang dengan para pimpinan dan rakyatnya, ia dinyatakan sebagai “Bayang-bayang Tuhan di Bumi” (*Zillullah fil Alam*).²

Ketika dunia Melayu³ memasuki akhir abad ke-17 sampai akhir abad ke-19 M, terjadi proses transmisi ajaran-ajaran dan gagasan Islam yang melibatkan sebuah jaringan intelektual (*intelektual network*).⁴ Memasuki abad ke-19 M tradisi intelektual Islam di dunia Melayu mengalami penguatan pemikiran, terutama dalam karya-karyanya menyangkut tentang orientasi ideologi politik.⁵ Pada abad ke-19 M, di dunia Melayu setidaknya terdapat dua orientasi ideologi yang berkembang, yakni pemikiran tentang ideologi kebangsaan yang mengadopsi model negara-bangsa (*nation-state*). Dan di sisi yang lain, terdapat pemikiran untuk merestorasi kerajaan yang menghendaki model kerajaan Melayu sebagai sistem sosial dan politik rakyat Melayu. Kedua *mainstream* pemikiran ini menandakan sebuah perkembangan intelektual di dunia Melayu, yang tidak hanya didominasi pemikiran tentang neo-sufisme, tetapi pemikiran yang lebih beragam dalam bidang sosial politik.⁶

Dalam hal ini kita mencoba mengelaborasi kedua *mainstream* pemikiran ini dalam konteks Melayu Indonesia saat ini. Apalagi secara historis telah terjadi perdebatan panjang hingga saat ini mengenai relasi Islam dan negara.⁷ Dalam perjalanan perpolitikan Indonesia, polemik relasi Islam dan negara tidak serta

²Lihat Oman Fathurahman, “Demokrasi dalam Tradisi Politik Islam Melayu”, dalam <http://islamlib.com/politik/demokrasi/demokrasi-dalam-tradisi-politik-islam-melayu/>. Diakses 1 Juli 2017, pukul 19.00 WIB

³Dunia Melayu pengertian secara luas yaitu negeri-negeri Melayu atau boleh juga dikatakan pulau-pulau Melayu terbentang dari semenanjung Melayu, pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku termasuk Irian, dan kepulauan Philipina (Luzon dan Mindanao). Hal ini berdasarkan pendapat Hamka, *Sejarah Ummat Islam*, Jilid IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 34-35.

⁴Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 121.

⁵Lihat Jajat Burhanuddin, “Tradisi Keilmuan dan Intelektual” dalam Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam, Asia Tenggara*” (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 160.

⁶Lihat Jajat Burhanuddin, “Tradisi Keilmuan dan Intelektual”, hlm. 161-162.

⁷Setidaknya terdapat tiga paradigma yang cukup populer, meski dengan berbagai istilah yang beragam. *Pertama*, paradigma integralistik, yaitu; paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. *Kedua*, paradigma sekuleristik, yakni; memisahkan antara negara dan agama secara diametral. *Ketiga*, paradigma simbiotik, yaitu; konsep ini menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang memiliki sistem ketatanegaraan. Tapi keduanya saling membutuhkan. Menurut Ibnu Taimiyah antara negara dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama (*syari'ah*). Bandingkan dengan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, UI Press, 1990), hlm.1-3; dan Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi, (1966-1993)*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999), hlm. 57; Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna ...*, hlm. 57; Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 1; Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Hukmi*, cet. I, (Dar al-Hilal, 1925), hlm. 64-65. Lihat juga Abd. Salam Arief, “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam”, dalam *Hermeheia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2 No. 2 Juli-Desember, (Yogyakarta, Program Pascasarjana IAIN Yogyakarta, 2003), hlm. 281; Tim Kajian Ilmiah Abituren 2007, *Simbiosis Negara dan Agama: Reaktualisasi Syari'at dalam Tatanan Kenegaraan*, (Kediri, Lirboyo, 2007), hlm. 28-35; Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam” dalam *Ulumul*

merta dapat dihilangkan karena mengingat bangsa Indonesia merupakan negara yang mayoritas Islam dan sekaligus bangsa yang majemuk, baik agama, budaya, dan sebagainya. Semuanya memiliki kepercayaan dan kebudayaan yang sudah mengakar sangat dalam di bumi Indonesia ini, maka tidak heran jika kemudian perdebatan-perdebatan yang merupakan representasi dari buah pikiran yang sudah mengakar pada perjalanan panjang negara Indonesia. Meskipun telah terjadi “kompromi politik”, di mana Pancasila merupakan elemen dari *nation building* dan *character building* yang diterima sebagai jalan tengah antara kalangan nasionalis-Islam. Tetapi, “pertarungan” nasionalis-Islam dengan nasionalis-sekuler ternyata masih tetap berlanjut hingga saat ini.

Selain itu, dalam perjalanannya setelah lebih dari sembilan belas tahun usia reformasi di Indonesia (1998-2017), ternyata belum juga membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh para pejuang reformasi, yaitu adanya pemerintahan yang baik dan bersih. Bahkan sebaliknya “setting” yang terjadi justru masih jauh dari keinginan dan tujuan reformasi itu sendiri, di mana semakin maraknya terjadi insiden korupsi. Birokrasi belum bisa menunjukkan kinerja yang efektif, efisien dan belum mampu memberikan citra dan praktik pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tanpa disadari aparat penegak hukum dan media massa justru merusak citra karakter bangsa.

Berbagai “dagelan politik” yang dipentaskan oleh para politisi dan pejabat negara telah menyebabkan negara ini mengalami keterpurukan yang pada gilirannya berdampak pada kehancuran sebuah bangsa. Ironis, negara dengan kekayaan alam yang demikian melimpah terpuruk hanya karena ulah segelintir orang. Bangsa ini akhirnya terjatuh ke dalam kubangan *the self-destroying nation*, bangsa yang sedang menghancurkan diri sendiri.⁸ Kondisi demikian menggambarkan betapa kacaunya wajah dunia politik negeri ini. Etika politik telah menjadi barang langka bagi aktor-aktor politik. Pentas politik tak lagi menjadi sebuah metodologi komunikasi yang menempatkan kepentingan semua pihak sebagai poros utama proses politik, melainkan ruang unjuk kebolehan kelompok *vis a vis* negara ataupun individu *vis a vis* individu menunjukkan berbagai sifat inkonsistensi, anomali, dan kontradiksi dalam setiap tindakan. Ironi politik adalah ruang tempat para aktor politik berpura-pura dan memainkan peran palsu.

Kondisi demikian tidak ingin terus menerus terjadi. Di sinilah kita perlu menggali kembali tradisi kearifan lokal politik Islam Melayu. Dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak beberapa abad yang lalu menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari kebudayaan Melayu. Salah satu sumbangan terbesar adalah turut mewujudkan dan membentuk jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Tak berlebihan apabila akhirnya kebudayaan Melayu disebut sebagai akar jati diri bangsa ini. Pengaruh Melayu bagi bangsa Indonesia pada umumnya meliputi banyak hal, di antaranya adalah khazanah dalam budaya politik Islam.

Karena itu, tujuan makalah ini untuk menggali ide dan gagasan khazanah wawasan tentang kajian politik Islam Melayu serta diharapkan akan memberikan kontribusi berkaitan dengan upaya membangun *good governance* di Indonesia saat ini tengah carut marut.

Quran, Vol IV. No. 2, (Jakarta, LP2ES, 1993), hlm. 6; dan Muhammad al-Mubarak, *Ara 'Ibnu Taimiyah fi al-Dawlah wa Madza Tadakhuliha fi Majal al-Iqtisadi*, (Bairut, Dar al-Fikr, tth), hlm. 29.

⁸Lihat Kompas, Rabu, 22 Januari 2002

B. Realitas Politik Masyarakat Melayu Indonesia

Kehidupan orang Melayu, seperti diungkapkan Valentijn, sebenarnya orang Melayu sangat cerdas, pintar, dan manusia yang sangat sopan di seluruh Asia. Lebih jauh, dikatakan Valentijn, bangsa Melayu merupakan bangsa yang istimewa jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang pernah ia temui di sepanjang Asia. Tidak hanya karena bentuk fisik yang sempurna, akan tetapi lebih ditekankan pada aspek moral dan kultur Melayu itu sendiri.⁹ Pandangan Valentijn, tentu saja sangat beralasan, karena bangsa Melayu adalah bangsa yang sangat lentur terhadap akomodasi budaya luar yang lebih tinggi, sehingga Melayu tidak hanya sebagai bagian entitas suku berdasarkan bentuk fisik (warna kulit, raut muka dan sebagainya), tetapi memiliki makna sebagai bangsa dengan karakter sikap sebagaimana yang disampaikan oleh Valentijn tersebut.¹⁰ Akomodasi terhadap budaya tersebut disebabkan orang Melayu itu sendiri yang tanpa henti melakukan hubungan dengan bangsa-bangsa di wilayah Nusantara dan bahkan hingga ke daerah yang sangat jauh terutama daerah India, Arab dan Persia.

Pertemuan mereka dengan bangsa lain, dalam kacamata antropologi akan sangat memungkinkan terjadinya difusi budaya, yaitu penyebaran budaya dari kelompok masyarakat tertentu ke kelompok lainnya. Friedrich Ratzel, umpamanya melihat item budaya cenderung menyebar, sedangkan seluruh budaya yang kompleks (sifat yang menonjol pada budaya yang terkait dalam kelompok) disebarkan melalui migrasi.¹¹ Dalam perspektif teori difusi, kebudayaan bangsa Melayu tersebar tidak hanya melalui migrasi, tetapi juga melalui proses perdagangan, dan lain sebagainya.¹² Sejarah telah mencatat, bahwa bangsa Melayu merupakan bangsa ‘penakluk’ dan orang yang berhasil ‘memerintah’ suku-suku lainnya di Nusantara.¹³ Hal tersebut berlangsung melalui proses yang sangat panjang, yaitu peranan bangsa Melayu dalam perdagangan internasional dan antar pulau, setidaknya mulai abad ke-5 M.¹⁴

Jika dilihat dinamika kerajaan Melayu yang terdapat dalam sejarah tersebar di seluruh wilayah pesisir dan *maritime based*, misalnya, Sriwijaya merupakan kerajaan maritim.¹⁵ Dengan sifatnya yang *maritim based* ini telah mengantarkan kerajaan-kerajaan Melayu sebagai kota metropolitan di masanya. Pun, kehidupan masyarakat Melayu sangat erat kaitannya dengan pelayaran dan perdagangan, sehingga dari sini sangat dimungkinkan akan terjadinya difusi budaya. Dan di sisi lain, menunjukkan bahwa pertualangan dan pelayaran masyarakat Melayu inilah yang pada akhirnya memperkaya budaya bangsa dan bahkan menjadi jati diri Bangsa Indonesia. Bahkan Martin van Bruinessen mencatat di antara semua bangsa yang berada di Makkah, orang Jawi (Asia Tenggara) merupakan salah satu kelompok terbesar sejak tahun

⁹ Isjoni, *Orang Melayu di Zaman yang Berubah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 29.

¹⁰ Dikutip oleh Sunandar menyebutkan bahwa Melayu jika ditinjau dari sudut pandang bahasa berasal dari kata ‘laju’ yang bermakna cepat, deras, dan tangkas. Makna orang Melayu itu bersifat tangkas dan cerdas, segala tindak tanduk mereka cepat dan deras. Dengan demikian, kecerdasan merupakan bagian penting sebagai ciri/karakter Melayu itu sendiri. Lihat Sunandar, *Peran Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Kerajaan Al-Watzikhoebillah Sambas 1913-1976*. Tesis, Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Program Pascasarjana: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 27-28.

¹¹ Aland Barnard, *History and Teori in Antropology*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2000), hlm. 50.

¹² Dalam masyarakat Melayu Palembang, kita akan menemukan banyak sekali varian budaya yang telah mengalami difusi tersebut, misalnya Wayang Palembang yang berasal dari pulau Jawa, *bebaso* atau sering disebut bahasa Keraton, bahasa Bari, atau bahasa *Kulo Iki*, juga dalam bentuk budaya yang lain seperti makanan dan sebagainya.

¹³ Lihat Isjoni, *Orang Melayu...*, hlm. 28.

¹⁴ Lihat, V.I. Braginsky, *Yang Indah, Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7-9*, terj. HersriSetiawan, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 2.

¹⁵ Isjoni, *Orang Melayu...*, hlm. 29.

1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Makkah.¹⁶ Di sinilah mereka menjadi *transmitter* utama tradisi intelektual-keagamaan dari pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah ke Nusantara.¹⁷

Namun kini orientasi politik masyarakat Melayu Indonesia dapat dikatakan tengah berada di persimpangan jalan. Kekuatan politik dan intelektual keagamaan yang telah tumbuh dan berkembang dalam diri orang Melayu kembali dipertanyakan. Slogan “*tak kan Melayu hilang ditelan Bumi*” perlu kita dudukkan sebagai persoalan bersama. Tentu saja bukan didasarkan pada sikap skeptis, pesimis dan sebagainya. Kejayaan yang pernah diraih bangsa Melayu sangat pantas kita jadikan sebagai dasar pijakan dalam aksi dan reaksi intelektual terhadap persoalan umat saat ini.

Percaturan politik di tanah air, sebagaimana kita saksikan akhir-akhir ini seolah-olah telah kehilangan ruh dan semangat dalam mensejahterakan rakyatnya, pertikaian politik yang diikuti dengan tindak pidana korupsi oleh elit-elit politik di negeri ini menjadi berita harian di media massa, sehingga terkesan menjadi hal biasa dan wajar. Padahal, tradisi politik orang Melayu yang telah dipraktikkan oleh para *founding father* negeri Melayu telah jelas menempatkan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama, sebagaimana wasiat Bendahara Paduka Raja Melaka dalam kitab *Sulâlat al Salâtîn*, sebagai berikut;

Hendaklah kamu semua tuliskan kepada hatimu pada berbuat kebaktian kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah sallâllahû alayhi wasallam; dan janganlah kamu sekalian melupai daripada berbuat kebaktian; karena pada segala hukum, bahwa raja-raja yang adil itu dengan Nabi sallâllahû alayhi wasallam umpama dua buah permata pada sebetuk cincin; lagi pula raja itu umpama ganti Allah di muka bumi, karena ia *zillu 'llah fil'alam*. Apabila kamu berbuat kebaktian kepada raja, serasa berbuat kebaktian akan Nabi, apabila berbuat kebaktian akan Nabi Allah, serasa berbuat kebaktian akan Allah Ta'ala.¹⁸

Lebih jauh, realitas politik masyarakat Melayu Indonesia saat ini, seperti kata Krisna Budiman¹⁹ sebagian besar penguasa dan politisi negeri ini menganut dan mengamalkan gagasan Machiavelli. **Pertama**, dalam rangka meraih kekuasaan. Machiavelli mengajarkan bahwa seseorang dapat melakukan cara apapun untuk meraih kekuasaan (*the ends justify the means*). Pada kondisi di mana taraf berpikir rakyat stagnan, tampillah sosok politisi yang dianggap mampu membawa angin perubahan serta pembaharuan ekonomi dan politik, maka tampillah para politisi yang saling berlomba menarik simpati rakyat dengan beragam karakter. Ada yang seolah-olah sangat dekat dan sangat peduli dengan rakyat, ada yang tampil dengan penampilan dan gaya bicara yang memikat, ada yang keberhasilannya dalam bisnis bisa menarik kepercayaan rakyat, dan lain sebagainya. Mereka pun berani mengeluarkan uang ratusan miliar demi kekuasaan yang didambakan itu. Bagi mereka, hal itu sudah wajar. Ibarat investasi, pastilah hasil yang diperoleh lebih besar dari modal yang dikeluarkan

Kedua, dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Machiavelli mengajarkan bahwa seorang politisi harus memiliki dua sifat, yaitu sifat manusia--tulus, penyayang, baik, pemurah--tetapi juga memiliki sifat-

¹⁶Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan 1995), hlm. 41; Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm.343.

¹⁷Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, cet.4, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 17.

¹⁸Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan kekuasaan*, cet. Ke-3, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 96.

¹⁹Lihat Krisna Budiman, “Cermin Khasanah Melayu: Tinjauan Pemimpin Ideal dari Sudut Pandang Melayu”, dalam <http://www.rajaalihaji.com/id/article.php?a=ZURIL3c%3D>. Diakses 30 Mei 2017.

sifat binatang atau sifat tidak terpuji, jahat, kikir, licik, bengis, dan kejam. Tak heran banyak penguasa yang bermuka dua. Di depan rakyat, penguasa selalu bersikap manis, baik dan tulus, namun dibelakang rakyat, penguasa itu mengkhianatinya. Korupsi, tindakan asusila dan kriminal pejabat, baik di pusat maupun di daerah senantiasa menjadi *headline* di media-media cetak dan elektronik tanah air. Hal ini juga menjelaskan mengapa koalisi politik yang hanya seumur jagung. Artinya, begitu kepentingan pihak-pihak yang berkoalisi telah terpenuhi, maka bubar pula koalisi politik itu. Koalisi politik juga bisa terbentuk jika mereka memiliki musuh bersama (*common enemy*), begitu musuh bersama berhasil disingkirkan bubar pula koalisi-koalisi politik itu.

Dalam perspektif tradisi politik Melayu, seorang pemimpin dituntut untuk berbuat adil dalam kepemimpinannya. Sebab posisinya sangat sakral dalam tradisi politik Melayu, diibaratkan “dua permata pada sebetuk cincin”, dekat dengan Nabi Muhammad. Sikap kepemimpinan Nabi SAW menjadi model yang tidak boleh pudar, keadilan, kesejahteraan, perlindungan terhadap kaum yang lemah dan sebagainya harus benar-benar terlaksana. Model kepemimpinan seperti ini, juga kita temui dalam undang-undang kesultanan Melayu di seluruh Nusantara. Penguasa atau Raja dan hamba atau masyarakat harus berjalan pada rel masing-masing, penguasa menjalankan kepemimpinannya sebagai amanah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah, begitu pula hamba harus patuh dan taat kepada pemimpin. Ancaman yang diberikan bagi mereka yang ingkar juga dituliskan dalam kitab *Sulâlat al Salâtîn* sebagai berikut:

“dan tiada akan sentosa kerajaannya; karena raja-raja itu umpama api, segala menteri itu umpama kayu; karena api tiada akan nyala, jikalau tiada kayu; seperti kata Farsi, *ar'ayatu juan bakhasta sultan khasad*(sic), yakni rakyat itu umpama akar dan raja itu umpama pohon; jikalau tiada akar niscaya pohon tiada akan berdiri. Demikianlah raja itu dengan segala rakyat. Hai anakku, hendaklah engkau turut seperti amanatku ini; supaya engkau beroleh berkat diberi Allah Subhanahu wa ta'ala”²⁰.

Demikian pula janji politik yang diberikan oleh pemimpin, harus ditepati sebagaimana yang tertuang dalam *Sulâlat al Salâtîn*:

“Jikalau raja Melayu itu mengubah perjanjian dengan Hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan takhta kerajaannya. Itulah dianugerahkan Allah subhanahu wa taala pada segala raja-raja Melayu, tiada pernah memberi aib kepada segala Hamba Melayu, jikalau sebagaimana sekalipun besar dosanya, tiada diikat dan tiada digantung, difadihatkan dengan kata-kata yang keji hingga sampai pada hukum mati, dibunuhnya. Jikalau ada seorang raja-raja Melayu itu memberi aib seseorang Hamba Melayu, alamat negerinya akan binasa”²¹.

Kesetiaan menepati janji dalam politik Melayu menjadi salah satu syarat penting dalam mensejahterakan masyarakat. Pesan moral yang tertuang dalam kitab *Sulâlat al Salâtîn* menjadi penting dalam percaturan politik Indonesia saat ini. Kitab *Sulâlat al Salâtîn* adalah salah satu contoh pedoman yang telah dijalankan dalam perpolitikan kesultanan Melayu tempo dulu yang menjadi spirit bagi para pemimpin saat ini.

²⁰Dikutip dari Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara...* hlm. 99.

²¹A. Samad Ahmad, *Sulatus Salatin, Sejarah Melayu Edisi Pelajar*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 2008), hlm. 26.

C. Menggali Khazanah Politik Melayu : *Theo-Monarchy vs Nation State*

Adalah Naquib al-Attas mengatakan bahwa Islam telah berjasa kepada Melayu Nusantara karena telah memberi semangat hebat yang menggerakkan proses revolusi hidup berdasarkan pandangan alam seni dan alam falsafah yang berdasarkan akal dan budi.²² Dalam perkembangannya, Melayu diidentikkan dengan Islam. Bahkan, Islam dan Melayu menjadi dua kata yang berjalan beriringan; Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu, sebaliknya masyarakat Melayu juga menjadi sangat identik dengan Islam.

Meskipun hanya mengakui Islam sebagai agama resmi, namun kultur Melayu sangat terbuka dan tidak pernah menolak kedatangan kultur lain yang berbeda agama, etnis, bahasa, bangsa, negara, dan sebagainya. Hamidy²³ menegaskan bahwa wilayah Melayu komposisi masyarakatnya majemuk. Kemajemukan tersebut selain membuat orang Melayu menjadi luas wawasannya, berkembang ilmu pengetahuannya juga memberi peluang bersatunya keberagaman kultur. Melayu dan Islam dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Melayu berkembang karena Islam dan Islam merupakan jati diri kultur Melayu.²⁴

Dalam tradisi politik Melayu etika para pemimpin Melayu diturunkan dari konsep-konsep Islam. Hal ini dikarenakan Islam merupakan identitas karakter yang hingga kini melekat dalam masyarakat Melayu. Nuansa Islam sangat kental mewarnai pola pemerintahan dalam budaya Melayu. Dalam khazanah politik Melayu, pemimpin didefinisikan sebagai orang yang diberi kelebihan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Arti raja atau penguasa dimaknai oleh bangsa Melayu lewat pepatah lama: *Yang didahulukan selangkah/ Yang ditinggikan seranting/ Yang dilebihkan serambut/ Yang dimuliakan sekuku.*

Pepatah tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa seorang raja (pemimpin) haruslah sosok manusia yang dapat dekat dengan rakyatnya. Pemimpin harus berada di tengah-tengah rakyatnya, mengerti kondisi warganya, dan tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Pemimpin bukanlah dewa yang tak tersentuh oleh manusia. Di sinilah, dalam khazanah politik Melayu terdapat beberapa kriteria seorang pemimpin, di antaranya; pemimpin harus banyak ilmu pengetahuan; pemimpin harus memiliki mental yang tangguh dan sabar-tawakkal; pemimpin harus memiliki sifat kebijaksanaan; dan sebagainya.²⁵ Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila kita kembali pada khazanah Melayu yang merupakan pembentuk karakter bangsa ini.²⁶

Bercermin, pada abad ke-19 M, cendekiawan Melayu, seperti Raja Ali Haji (1809-1870), dalam kitab *Muqaddimah fi Intidzam*,²⁷ mencita-citakan pemerintahan yang berbentuk kerajaan dan kekuasaan mutlak dipegang oleh seorang raja yang selalu berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seorang raja idealnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan untuk membedakan antara yang

²²Haji MD. Zain Haji Serudin, *Melayu Islam Beraja, Suatu Pendekatan*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1998), hlm. 224.

²³Hamidy, *Good Governance dalam Perspektif Budaya Melayu*, (Riau: Pemprov Riau, 2004), hlm. 47.

²⁴Heddy Shri Ahimsa-Putra, (ed.), *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007), hlm. 73-74.

²⁵Lihat Rahimin Affandi Abd. Rahim, Ruzman Md. Nor, Nor Hayati Bt Md Dahlal, dan Norafifah Abd Hamid, "Islam dan Kearifan Tempatan Di Alam Melayu: Analisis Kritikal (Islam and Local Wisdom in Malay World: Critical Analysis)". Dalam *Jati*, Volume 18, December, (Journal of Southeast Asian Studies Departement of Southeast Asian Studies Faculty of Arts dan Social Sciences University of Malaya, 2013), hlm. 223-245.

²⁶Jacobsen G.A dan Lipman, M.H. *Political Science, "College Outline Series"* (New York: Barnes and Noble, 1956). Dalam buku tersebut, ia mendefinisikan "bangsa" sebagai "kesatuan budaya" (*cultural unity*) dan suatu "kesatuan politik" (*political unity*).

²⁷Syamsul Anwar, "Petuah Ali Haji (1809-1872): Tinjauan tentang Thamrah al- Muhimmah", dalam *Al-Jamiah Journal of Islamic Studies*, (Yogyakarta: State Islamic University (IAIN) Sunan Kalijaga, No. 62/XII/1998), hlm. 166; lihat juga Faishal Shadik, *Politik Islam Melayu* Sebuah Studi Pemikiran Raja Ali Haji, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPB), 2016)

baik dan yang buruk, sehingga setiap tindakan yang dilakukannya dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh rakyatnya. Artinya, ia menghendaki bentuk pemerintahan yang ideal berbentuk kerajaan dan berlandaskan kepada syariat Islam.

Berangkat dari pandangan ini, Raja Ali Haji berusaha membangun kembali supremasi politik kerajaan Melayu sebagai satu bangunan sosial-politik bagi masyarakat Melayu yang berlandaskan pada ajaran Islam. Untuk mewujudkan hal ini, ia membuat kriteria pemimpin dan kepemimpinan yang ideal.²⁸ Dalam membuat kriteria ini, ia banyak merujuk pada pemikiran politik al-Ghazali. Di sini, Raja Ali Haji menghendaki adanya proyeksi nilai-nilai moral spiritual agama dari setiap muslim ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Fenomena kemanusiaan dan keruntuhan suatu masyarakat, tidak semata-mata disebabkan oleh mundurnya pemikiran, tetapi juga oleh keruntuhan moral spiritual yang melanda para pemimpinnya.²⁹ Oleh karena itu, seorang raja, selain harus menguasai ilmu pengetahuan, tata pemerintahan, dan wawasan yang luas, ia juga harus mempunyai moralitas yang tinggi. Dengan demikian, bentuk pemerintahan yang diidealkan Raja Ali Haji dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerintahan 'teo-monarki', yaitu pemerintahan yang berbentuk kerajaan dengan mendasarkan kepada hukum Tuhan atau syariat Islam.

Di sinilah pentingnya etika politik dalam sistem politik Islam Melayu dan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Apa yang telah dikemukakan oleh Raja Ali Haji beberapa dekade yang lalu yang telah terekam dalam berbagai karyanya, khususnya *Tsamarat al-Muhimmah*³⁰ tentang kriteria kepemimpinan yang ideal, sudah cukup menjadi pelajaran bagi pelaksana negara di Indonesia. Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu, niscaya akan tercipta masyarakat yang adil, makmur, aman, dan tenteram; dan Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan bermartabat tinggi di mata bangsa-bangsa lain.

Bila dianalisis berdasarkan pemikiran politik Almond dapat ditegaskan bahwa Raja Ali Haji melihat kesultanan Melayu di masanya merupakan lembaga atau institusi politik yang berperan penting menjalankan pemerintahan harus memiliki keseimbangan dan komunikasi dengan unit-unit lain dalam pemerintahannya. Dan juga harus memiliki interaksi yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Di samping itu, Raja Ali Haji menghendaki perlu adanya budaya politik. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat. Budaya politik sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Di sinilah Raja Ali Haji menghendaki adanya budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif

²⁸Dalam salah satu karya sastranya, seperti ditulis Tenas Effendy, Raja Ali Haji mengungkapkan kepemimpinan ideal sebagai berikut; *Bertuah rumah ada tuannya/Bertuah negeri ada pucuknya/Elok rumah ada tuannya/Elok negeri ada rajanya*. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan adat Melayu yang menyatakan urgensi kepemimpinan dalam sebuah komunitas. Dalam semua komunitas sangat dibutuhkan figur seorang pemimpin, baik dalam kehidupan manusia bernegara, bermasyarakat, maupun berumah tangga. Ajaran Melayu berusaha mengangkat seorang pemimpin yang lazim disebut "orang yang dituakan" oleh masyarakat dan kaumnya. Pemimpin ini diharapkan dapat membimbing, melindungi, menjaga, dan menuntun masyarakat dalam arti luas, baik untuk kepentingan hidup duniawi maupun ukhrawi. Pemimpin seperti ini yang akan mampu memberikan kesejahteraan lahiriyah dan batiniyah kepada masyarakat. Lihat Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu Riau* (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2006), hlm. 65-66.

²⁹Abdul Hadi, "Raja Ali Haji: Ulil Albab di Persimpangan Zaman" dalam <http://jtopan.blogspot.co.id/2011/07/raja-ali-haji-ulil-albab-di.html>. Diakses 1 Agustus 2016, pukul. 20.00 WIB.

³⁰Mahdini, "Konsep Raja dan Kerajaan dalam Tsamrah Al-Muhimmah Karya Raja Ali Haji: Analisa Intertekstualitas", Disertasi Doktor (S3), (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

dalam kegiatan politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.

Konsep kerajaan Melayu yang selama ini berlaku ialah negara dikepalai oleh seorang raja, karena hak waris turun temurun. Sistem pengangkatan semacam ini, kalau tidak dibatasi hukum Tuhan adakalanya mudah menjadi pemerintahan tirani yang lebih mementingkan kepentingan individu daripada umum. Dengan demikian konsep pemerintahan bentuk kerajaanyang dikemukakan Raja Ali Haji termasuk upaya dalam melestarikan budaya Melayu sekaligus menyebarkan ajaran Islam.

Relevansi pemikiran Raja Ali Haji dengan sistem pemerintahan di Indonesia saat ini, antara lain, dapat dilihat dari kriteria pemimpin ideal yaitu *pertama*, memenuhi syarat-syarat menurut syariat Islam, yaitu; muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil/tidak fasik (konsisten dalam menjalankan aturan Islam), mampu dan melaksanakan amanat kepemimpinan. *Kedua*, menjadikan kekuasaan negeri ini independen/mandiri. *Ketiga*, menjadikan keamanan umat Islam di negeri ini adalah keamanan Islam. *Keempat*, menerapkan Islam secara serentak dan menyeluruh. *Kelima*, mencegah terjadinya disintergrasi dan menyatukan wilayah-wilayah umat Islam yang telah bercerai-berai, tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia, sehingga umat Islam kuat dan bersatu dalam satu kekuatan.

Melihat kondisi sistem politik dan pemerintahan di negara Indonesia saat ini, walaupun berbeda dari bentuk pemerintahan yang diinginkan oleh Raja Ali Haji sudah cukup sesuai dengan harapannya kalau kita merujuk kepada para pemimpin yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan, yaitu orang-orang yang telah dipercaya rakyat sebagai pemimpinnya. Pemimpin yang dipilih ini diharapkan dapat menyuarakan kepentingan mereka, sehingga kesejahteraan dan kenyamanan bisa lebih dirasakan.

Memang benar tidak dapat dipungkiri bahwa konsep pemerintahan menurut Raja Ali Haji, ada beberapa yang tidak sesuai dengan konsep pemerintahan di Indonesia. Sebab, di Indonesia, meski mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga agama non Islam pun tumbuh dan berkembang dengan baik dalam semangat toleransi yang tinggi. Sedangkan konsep pemerintahan menurut Raja Ali Haji yang ideal adalah berdasarkan syari'at Islam. Jika ini diterapkan maka adanya diskriminasi terhadap agama lain.

Selain itu, sastrawan Melayu sezaman dengan Raja Ali Haji, adalah Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1787-1854). Ia merupakan penggagas paham kebangsaan Melayu. Karya terpenting Abdullah Munsyi adalah Hikayat Abdullah yang telah merumuskan sebuah identitas masyarakat Melayu yang mengetengahkan sebuah identitas sebuah bangsa dalam rumusan ras atau suku. Hikayat Abdullah merupakan sebuah karya intelektual dunia Melayu yang mewakili sebuah karya yang dikenal liberal. Karya ini banyak menekankan pentingnya bangsa Melayu memperjuangkan hak-haknya baik sosial maupun politik mereka. Dalam karya ini pula ia banyak mengkritik ideologi politik kerajaan yang telah membuat kekacauan karena raja-rajanya telah berbuat tiran dan tidak adil.³¹

³¹Daniel Arif Budiman, "Ideologi Politik Melayu Abad ke-19 (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dan Raja Ali Haji), *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), hlm.3.

Hikayat Abdullah merupakan satu karya intelektual dunia Melayu yang menekankan pentingnya independensi bangsa Melayu serta hak-hak sosial dan politiknya. Dengan menonjolkan individualisme, maka dihadapkan dengan konsep kerajaan yang selama ini mendominasi kehidupan politik dunia Melayu. Ia sangat menghendaki bangkitnya kesadaran masyarakat Melayu sebagai komunitas politik yang memiliki hak-hak untuk dilibatkan dalam politik di dunia Melayu. Hasil pemikiran Abdullah lainnya yang penting adalah pandangannya tentang identitas bangsa Melayu yang diformulasikan dalam bentuk bangsa. Berbeda dengan konsep kerajaan yang memberikan pengertian bangsa mengacu kepada keturunan (monarki). Menurut pemikirannya konsep kebangsaan adalah komunitas bangsa Melayu yang merupakan bangunan sosial bagi masyarakat di mana prinsip yang dianut bersifat egaliter dan antiotokratik.³²

Kendati pemikiran Raja Ali Haji dan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi berbeda. Di mana konsep yang diusung oleh Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi lebih mengedepankan independensi orang Melayu yang dikonsepsikan dalam sebuah negara bangsa (*nation-state*). Sedangkan konsep yang diusung oleh Raja Ali Haji lebih kepada restorasi dunia Melayu kembali kepada konsep kerajaan seperti kerajaan Melayu yang dulu pernah berjaya. Tetapi, secara substansif sama, yakni berupaya merubah *mindset* adat istiadat dunia Melayu utamanya perilaku para raja yang tidak sesuai dengan Islam dan merugikan rakyat yang dipimpinya.

Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan, konsep negara bangsa (*nation-state*) yang digagas Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi merupakan konsep tentang negara modern yang terkait erat dengan paham kebangsaan atau nasionalisme. Suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern, setidaknya memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan dan penduduk yang merupakan modal sebuah bangsa (*nation*) sebelum menjadi sebuah negara bangsa, maka syarat-syarat yang lain adalah adanya batas-batas teritorial wilayah, pemerintahan yang sah, dan adanya pengakuan dari negara lain.³³

Konsepsi negara bangsa mutlak memerlukan *good governance*, pengelolaan yang baik, yang bertumpu kepada kemutlakan adanya transparansi, partisipasi terbuka, dan pertanggung jawaban di dalam semua kegiatan kenegaraan di setiap jenjang pengelolaan negara sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih.³⁴ Dan merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik (*political building*), seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri dan merupakan akibat langsung dari gerakan nasionalisme yang sekaligus telah melahirkan perbedaan pengertian tentang kewarganegaraan dari masa sebelum kemerdekaan.³⁵

Di sinilah titik temu pemikiran politik Melayu Raja Ali Haji dan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi perlu adanya *good governance* (pemerintahan yang baik). *Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, *civil society*, dan pihak

³²Lihat Jajat Burhanuddin, "Tradisi Keilmuan dan Intelektual", hlm. 161-162-164.

³³Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.32

³⁴Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 75.

³⁵Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, hlm. 24-25.

swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu.³⁶

D. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam telah mengakar di kalangan masyarakat Melayu, sehingga melandasi nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu, termasuk di ranah politik. Dengan kata lain, Islam telah berjasa kepada Melayu Nusantara karena telah memberi semangat hebat yang menggerakkan proses revolusi hidup berdasarkan pandangan alam seni dan alam falsafah yang berdasarkan akal dan budi. Dalam perkembangannya, Melayu diidentikkan dengan Islam. Bahkan, Islam dan Melayu menjadi dua kata yang berjalan beriringan; Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu, sebaliknya masyarakat Melayu juga menjadi sangat identik dengan Islam.

Namun ironisnya, kini orientasi politik masyarakat Melayu Indonesia dapat dikatakan tengah berada di persimpangan jalan. Kekuatan politik dan intelektual keagamaan yang telah tumbuh dan berkembang dalam diri orang Melayu kembali dipertanyakan. Percaturan politik di tanah air, telah kehilangan ruh dan semangat dalam mensejahterakan rakyatnya, pertikaian politik yang diikuti dengan tindak pidana korupsi oleh elit-elit politik di negeri ini menjadi berita harian, sehingga terkesan menjadi hal biasa dan wajar. Padahal, tradisi politik orang Melayu yang telah dipraktikkan oleh para *founding father* negeri Melayu telah jelas menempatkan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.

Dalam hal inilah perlu menggali kembali pemikiran cendekiawan Melayu abad ke-19 M, yakni; Raja Ali Haji (1809-1870) yang menggagas bentuk pemerintahan ‘teo-monarki’ dan Abdullah Munsyi (1787-1854) dengan gagasan paham kebangsaan Melayu. Meski pemikiran Raja Ali Haji dan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi berbeda. Tetapi, secara substansif sama, yakni berupaya merubah *mindset* adat istiadat dunia Melayu utamanya perilaku para raja yang tidak sesuai dengan Islam dan merugikan rakyat yang dipimpinnya.

Titik temu pemikiran politik Melayu Raja Ali Haji dan Abdullah Munsyi relevansi dengan realitas politik Melayu Islam Indonesia saat ini perlu adanya *good governance* (pemerintahan yang baik). *Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, *civil society*, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu. Karena dilandasi ajaran agama (Islam), akan terwujud spirit *good governance* di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

A. Samad Ahmad, *Sulatus Salatin, Sejarah Melayu Edisi Pelajar*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 2008)

³⁶Lihat Lalolo Krina. *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi*, (Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik, BAPPENAS, 2003), hlm.6.

- Abd. Salam Arief, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam", dalam *Hermeheia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2 No. 2 Juli-Desember, (Yogyakarta, Program Pascasarjana IAIN Yogyakarta, 2003)
- Abdul Hadi, "Raja Ali Haji: Ulil Albab di Persimpangan Zaman" dalam <http://itopan.blogspot.co.id/2011/07/raja-ali-haji-ulil-albab-di.html>. Diakses 1 Agustus 2016, pukul. 20.00 WIB.
- Abdul Hadi, "Islam di Nusantara dan Transformasi Kebudayaan Melayu", dalam <https://ahmadsamantho.wordpress.com/2008/04/10/islam-di-nusantara-dan-transformasi-kebudayaan-melayu/>. Diakses 2 Juli 2017, pukul. 19.00 WIB.
- Adian Husaini, "Liberalisasi Islam Tantangan bagi Peradaban Melayu", dalam Hamid Fahmy Zarkasyi dkk, *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004)
- Aland Barnard, *History and Teori in Antropology*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2000)
- Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Hukmi*, cet. I, (Dar al-Hilal, 1925)
- Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, cet.4, (Bandung: Mizan, 1998)
- Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan kekuasaan*, cet. Ke-3, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Daniel Arif Budiman, "Ideologi Politik Melayu Abad ke-19 (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dan Raja Ali Haji)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010)
- Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam *Ulumul Quran*, Vol IV. No. 2, (Jakarta, LP2ES, 1993).
- Faishal Shadik, *Politik Islam Melayu; Sebuah Studi Pemikiran Raja Ali Haji*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM), 2016).
- Haji MD. Zain Haji Serudin, *Melayu Islam Beraja, Suatu Pendekatan*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1998)
- Hamidy, *Good Governance dalam Perspektif Budaya Melayu*, (Riau: Pemprov Riau, 2004)
- Hamka, *Sejarah Ummat Islam*, Jilid IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, (ed.), *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan* (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007)
- Isjoni, *Orang Melayu di Zaman yang Berubah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Jacobsen G.A dan Lipman, M.H. *Political Science, "College Outline Series"* (New York: Barnes and Noble, 1956)
- Jajat Burhanuddin, "Tradisi Keilmuan dan Intelektual" dalam Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam, Asia Tenggara*" (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2002)
- Kompas, Rabu, 22 Januari 2002
- Krisna Budiman, "Cermin Khasanah Melayu: Tinjauan Pemimpin Ideal dari Sudut Pandang Melayu", dalam <http://www.rajaalihaji.com/id/article.php?a=ZURIL3c%3D>. Diakses 30 Mei 2017.
- Lalolo Krina. *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi*, (Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik, BAPPENAS, 2003), hlm.6.
- Mahdini, "Konsep Raja dan Kerajaan dalam Tsamrah Al-Muhimmah Karya RajaAli Haji: Analisa Intertektualitas", Disertasi Doktor (S3), (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2002)
- Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan 1995), hlm. 41; Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007)
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual MuslimIndonesia Terhadap Demokrasi, (1966-1993)*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999)
- Muhammad al-Mubarak, *Ara 'Ibnu Taimiyah fi al-Dawlah wa Madza Tadakhuliha fi Majal al-Iqtisadi*, (Bairut, Dar al-Fikr, tth)
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, UI Press, 1990)
- Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 75.
- Oman Fathurahman, "Demokrasi dalam Tradisi Politik Islam Melayu", dalam <http://islamlib.com/politik/demokrasi/demokrasi-dalam-tradisi-politik-islam-melayu/>. Diakses 1 Juli 2017, pukul 19.00 WIB.

- Rahimin Affandi Abd. Rahim, Ruzman Md. Nor, Nor Hayati Bt Md Dahlal, dan Norafifah Abd Hamid, "Islam dan Kearifan Tempatan Di Alam Melayu: Analisis Kritikal (Islam and Local Wisdom in Malay World: Critical Analysis)". Dalam *Jati*, Volume 18, December, (Journal of Southeast Asian Studies Departement of Southeas Asian Studies Faculty of Arts dan Social Sciences University of Malaya, 2013)
- Sunandar, *Peran Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Kerajaan Al-Watzikhoebillah Sambas 1913-1976*. Tesis, Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Program Pascasarjana: UIN Sunan Kalijaga, 2013)
- Syamsul Anwar, "Petuah Ali Haji (1809-1872): Tinjauan tentang Thamrah al- Muhimmah", dalam *Al-Jamiah Journal of Islamic Studies*, (Yogyakarta: State Islamic University (IAIN) Sunan Kalijaga, No. 62/XII/1998)
- Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu Riau* (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2006)
- Tim Kajian Ilmiah Abituren 2007, *Simbiosis Negara dan Agama: Reaktualisasi Syari'at dalam Tatanan Kenegaraan*, (Kediri, Lirboyo, 2007)
- Tuanku Luckman Sinar Basyarsyah, "Jati Diri", dalam Tuanku Luckman Sinar Basyarsyah dan Wan Syaifuddin (ed), *Kebudayaan Melayu Sumatera Timur*, (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1987)
- V.I. Braginsky, *Yang Indah, Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7-9*, terj. Hersri Setiawan, (Jakarta: INIS, 1998)

ISLAM AND HUMANITIES (ISLAM AND MALAY LOCAL WISDOM)

Kontak Melayu sebagai entitas kebudayaan dengan Asia Barat (Arab) melahirkan asimilasi budaya yang sangat kuat dan berpengaruh pada penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tenggara. Kebudayaan Arab merupakan kebudayaan yang paling banyak berpengaruh di samping budaya dari kawasan anak benua India dan Asia Selatan. Begitu kuatnya pengaruh Islam terhadap kebudayaan Melayu sehingga muncul kesimpulan bahwa “Dunia Melayu Dunia Islam”. Secara kultural, tesis kebudayaan Melayu dan Islam dapat dilihat dalam ungkapan “Adat bersendi syarak, syarak bersendikan Kitabullah” di daerah-daerah, seperti: Aceh, Minangkabau, Riau, Jambi, Palembang, Banjar, Bugis, Gorontalo, Ternate, dan sebagainya. Adagium yang kemudian populer adalah “Tak Melayu Tak Islam”.

Islam telah mewarnai kebudayaan Melayu sehingga menjadi sebuah entitas budaya yang khas dan *distinctive* dengan keislaman. Unsur-unsur budaya lokal mempunyai potensi *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Dalam perkembangan selanjutnya *local genius* ini menjadi sebuah kearifan lokal (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Namun, pada kenyataannya kearifan lokal Melayu ini mulai ditinggalkan seiring kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih. Pada bagian yang lain, kearifan lokal semakin hilang seiring munculnya gerakan *puritanisme* yang *memberangus* budaya-budaya lokal yang secara generik dianggap tidak islami.

Prosiding The 2nd Annual International Symposium on Islam and Humanities (Islam and Malay Local Wisdom)

Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab (ADIA)
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia
Palembang, 08-11 September 2017

